

**STRATEGI KOMUNIKASI DALAM PENERAPAN
E-GOVERNMENT OLEH DISKOMINFO
KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Foby Williando
NPP. 29.0208

*Asdaf Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan*

Email:
foby.04@gmail.com

ABSTRACT

The Problem (GAP): *The gap in internet access in each region causes difficulties for district/city governments in implementing e-government where each region should have internet access that spreads throughout the region in the regional government. Purpose:* *The purpose of writing this thesis is to find out the communication strategy in implementing e-government by the Communication and Information Office of Pasaman Regency in the efforts that can be made in implementing the communication strategy as the embodiment of e-government services for the people in Pasaman Regency and what are the supporting and inhibiting factors in that effort. Method:* *The method that the author uses in solving problems in writing this thesis is a descriptive qualitative method. The data collection technique used in this thesis is through the process of observation (observation), interviews, documentation and ASOCA theory as the operational concept of this research. In addition, the strategy of the Department of Communication and Information related to communication to the public is also the core of this research, especially in the e-commerce section. government. Results/Findings:* *The Communication Strategy in the Implementation of E-government by Diskominfo Pasaman Regency is still not effective let alone efficient. There is still a lot that needs to be improved both from the infrastructure sector, human resources and communication strategies in implementing e-government in Pasaman Regency, West Sumatra Province. The government's role is very much needed in this program because in general everything goes back to the budget allocated to the Communication and Information Office. Conclusion:* *The author concludes that in implementing the strategy that has been set there are several obstacles that become inhibiting factors, namely infrastructure, lack of human resources and lack of budget. Thus, the suggestion that the author can give is the importance of the government's role in increasing the budget so that the duties and responsibilities of the Communications and Information Technology Service itself can be carried out properly so that we can innovate again regarding this electronic-based government system. In addition, the evaluation of Pasaman Regency e-government is also classified as low value because the existing facilities are not in accordance with the work demands.*

Keywords: *Strategy, E-government, Communication, Infrastructure*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Kesenjangan akses internet di masing-masing daerah menyebabkan kesulitan pemerintah kabupaten/kota daerah dalam menerapkan e-government dimana setiap daerah harusnya memiliki akses internet yang menyebar keseluruh penjuru wilayah di pemerintahan daerah tersebut. **Tujuan:** Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah mengetahui strategi komunikasi dalam penerapan *e-government* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman dalam Upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan strategi komunikasi sebagai perwujudan layanan *egovernment* bagi masyarakat di Kabupaten Pasaman serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam upaya tersebut. **Metode:** Metode yang penulis gunakan dalam menyelesaikan masalah dalam penulisan skripsi ini ialah Metode Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini melalui proses observasi (pengamatan), wawancara ,dokumentasi serta teori ASOCA sebagai operasional konsep dari penelitian ini.selain itu strategi dari Dinas Komunikasi dan Informatika terkait komunikasi kepada masyarakat juga menjadi inti dari penelitian ini terutama dibagian *e-government*.**Hasil/Temuan:** Strategi Komunikasi dalam Penerapan *E-government* oleh Diskominfo Kabupaten Pasaman masih belum efektif apalagi efisien. Masih banyak yang perlu diperbaiki baik dari sector infrastruktur , sumber daya manusia maupun strategi komunikasi dalam implementasi *egovernment* di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam program ini karena pada umumnya semua Kembali kepada anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. **Kesimpulan:** Penulis menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan strategi yang sudah ditetapkan terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat yaitu infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya anggaran. Dengan demikian, saran yang bisa penulis berikan ialah pentingnya peran pemerintah untuk manambah anggaran agar tugas dan tanggungjawab dari Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri bisa terlaksana dengan baik sehingga kita bisa berinovasi Kembali terkait system pemerintahan berbasis elektronik ini. Selain itu , evaluasi *e-government* Kabupaten Pasaman juga tergolong bernilai rendah dikarenakan fasilitas yang ada belum sesuai dengan tuntutan kerja.

Kata Kunci : Strategi, *E-government*, Komunikasi, Infrastruktur

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zaman sekarang kecepatan informasi sangatlah cepat. Berbeda dengan dahulu dimana sistem penyebaran informasi memerlukan waktu yang lama dan dioperasikan secara manual. Perkembangan teknologi di bidang komunikasi setiap tahunnya memiliki perubahan yang semakin canggih dalam memberikan informasi. Penyebabnya adalah munculnya kesadaran dari masyarakat masa kini dengan kemajuan teknologi tersebut. Untuk mendapatkan informasi terbaru masyarakat hanya perlu menggunakan internet dengan mengunjungi website sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.

E-Government merupakan suatu program dalam sistem pemerintah yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pendigitalisasian program pemerintahan. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengutarakan pendapat maupun memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti yang kita ketahui Bersama bahwasannya masyarakat sekarang pada umumnya telah menggunakan gadget yang dapat memudahkan masyarakat dalam mencari informasi. Pembaharuan dalam bidang infrastruktur teknologi komunikasi di Indonesia setiap tahunnya mengalami kemajuan dimana Sebagian besar masyarakat telah mengenal dengan internet. Sehingga setiap bidang pekerjaan dalam perusahaan, instansi maupun swasta menstandarisasikan pegawainya memiliki keahlian menggunakan internet seperti menggunakan media sosial maupun aplikasi dalam mencari informasi yang dapat menunjang pekerjaannya.

Dengan tersebarnya pengaruh internet dikalangan pemerintahan menyebabkan dampak bagi karyawan negeri maupun honorer dimana mereka diwajibkan memiliki kemampuan mengakses internet maupun menggunakan aplikasi yang berfungsi meningkatkan kualitas sistem dan program pemerintah dalam penerapan e-government. Kesenjangan akses internet di masing-masing daerah menyebabkan kesulitan pemerintah kabupaten/kota daerah dalam menerapkan e-government dimana setiap daerah harusnya memiliki akses internet yang menyebar keseluruh penjuru wilayah di pemerintahan daerah tersebut. Hal ini mengakibatkan paradigma dalam menerapkan e-government sangat sulit terutama di kabupaten/kota yang masih berkembang.

Pada akhirnya diterbitkanlah kebijakan untuk setiap kabupaten/kota wajib menerapkan e-

government dimana tujuannya ialah memberikan informasi dengan cepat dan tepat agar terhindar dari berita yang tidak benar tersebar di kalangan masyarakat. Sehingga tujuan utama dalam menerapkan e-government memerlukan keefektifan strategi transformasi dan penyimpanan sekaligus pembentukan strukturnya harus diperhatikan.

Pemerintah kabupaten Pasaman membuat rencana program kerja dalam memaksimalkan publikasi data Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pasaman sebagai Langkah awal penerapan e-government oleh pemerintah melalui kolaborasi dari humas dan dinas komunikasi dan informatika kabupaten Pasaman. Dalam memaksimalkan e-government di kabupaten Pasaman diperlukan perencanaan dan strategi dikarenakan sebagian SKPD belum paham dan mengerti dalam menggunakan program e-government, maka perlu sosialisasi terhadap program kerja tersebut melalui humas dan diskominfo sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memaksimalkan program e-government. Sosialisasi ini juga membantu menyelesaikan beberapa program kerja dari humas dan diskominfo sebagai bentuk kinerja aparatur sipil negara dibidang komunikasi dan informasi.

Perencanaan yang dibangun harus dapat dimengerti masyarakat baik individu yang bekerja di pemerintahan maupun bukan pemerintahan demi program e-government tersebut. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah membentuk website dan akun media sosial dikarenakan sudah banyaknya populasi masyarakat yang sudah mengetahui akan penggunaan internet di zaman sekarang.

Fasilitas infrastruktur jaringan sangat diperlukan sebagai dasar koneksi untuk komunikasi layanan teknologi komunikasi dan informasi.

Pemanfaatan teknologi berlandaskan teknologi informasi merupakan salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas layanan informasi yang cepat dan tepat. Integrasi sistem aplikasi merupakan kesatuan dari berbagai aplikasi layanan di dalam pemerintahan guna memudahkan pemindahan data antara beberapa instansi pemerintahan sebagai wujud layanan e-government kepada masyarakat. Menambah kemampuan dan keahlian sumber daya manusia untuk mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi guna mewujudkan pelayanan yang prima.

E-Government menjadi jawaban dari pemerintah dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. EGovernment perlu diterapkan dalam pemerintahan, terutama dalam proses pelayanan publik. Tuntutan dari masyarakat akan sistem pemerintahan yang bersih dan pelayanan yang efektif dan efisien serta berkualitas pun telah mendorong pemerintah untuk memaksimalkan eGovernment. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menyatakan bahwa “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan akses internet di masing-masing daerah menyebabkan kesulitan pemerintah kabupaten/kota daerah dalam menerapkan e-government dimana setiap daerah harusnya memiliki akses internet yang menyebar keseluruh penjuru wilayah di pemerintahan daerah tersebut. Hal ini mengakibatkan paradigma dalam menerapkan e-government sangat sulit terutama di kabupaten/kota yang masih berkembang. Pada akhirnya diterbitkanlah kebijakan untuk setiap kabupaten/kota wajib menerapkan e-government dimana tujuannya ialah memberikan informasi dengan cepat dan tepat agar terhindar dari berita yang tidak benar tersebar di kalangan masyarakat. Sehingga tujuan utama dalam menerapkan e-government memerlukan keefektifan strategi transformasi dan penyimpanan sekaligus pembentukan strukturnya harus diperhatikan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian Destya Ayu Laela Rhomadhona (2020), berjudul “Pelaksanaan E-Government Dalam Pelayanan Perizinan Oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Aplikasi Gadget Mobile Application For License/Gampil)”. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan e-Government dalam pelayanan perizinan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang berbasis aplikasi GAMPIL serta faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan e-Government pelayanan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Bandung Metode

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif yaitu suatu metode untuk membuat gambaran secara jelas dan sistematis, faktual dan akurat dari data-data dan fakta yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi

Kedua, Skripsi dari Riska Aulia mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa(AULIA et al.) dengan judul penelitian tentang “Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Via Aplikasi Tangerang Live Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Masyarakat Di Kota Tangerang”. Dalam skripsinya membahas tentang Strategi Pemerintah Kota Tangerang dalam mempertimbangkan beberapa kriteria yang terdapat dalam Aplikasi Tangerang Live sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat.

Ketiga, Penelitian Dinda Nursah Yasti (2019), berjudul “Kualitas Pelayanan Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 “(DINDA) fokus penelitian ini terletak pada Pelayanan publik yang merupakan pemberian layanan atas keperluan orang atau masyarakat sesuai dengan aturan pokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemanfaatan (E-Government) dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tahun 2019. Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu indikator kepuasan pelanggan dari Kenedy dan Young. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di Lokus Penulis.

1.5. Tujuan.

Dibuatnya penelitian ini, memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Mengetahui bagaimana strategi Kabupaten Pasaman dalam menerapkan e-Gov di masyarakat.

2. faktor pendukung dan penghambat Strategi Komunikasi dalam penerapan *e-government* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pasaman
3. Menjelaskan upaya dalam menerapkan *e-Government* yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan strategi komunikasi sebagai perwujudan layanan *e-government* bagi masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*taking notes*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis dan Pembahasan Penelitian

Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan teori Analisis ASOCA (Ermaya S.2013)(Ermaya Suradinata). Dimana dimensi pengukuran meliputi lingkungan internal yang terbagi atas kemampuan, kecerdasan dan kekuatan serta lingkungan eksternal yang terbagi atas peluang dan budaya.

Dalam menjalankan suatu program di dalam sebuah organisasi pasti terdapat tujuan yang ingin dicapai. Program yang sudah ditetapkan sebelumnya akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar dalam pelaksanaannya bisa memperoleh hasil yang maksimal. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan suatu instansi yang bertugas dalam bidang informasi. Setiap program yang ditetapkan pasti akan dijalankan nantinya termasuk penyampaian informasi kepada publik. Seiring perkembangan zaman, penyampaian informasi saat ini sudah dilakukan secara digital atau online. Selain dengan menggunakan media cetak, penyampaian informasi juga dilakukan dengan

memanfaatkan media sosial yang ada seperti website, blog, facebook, twitter, instagram dan media-media penyampai informasi digital lainnya.

Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk memberikan sebuah informasi terbaru, teraktual dan terupdate terhadap suatu persoalan atau peristiwa. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat mendapatkan informasi dari instansi pemerintah secara resmi tanpa perlu memikirkan apakah informasinya benar atau tidak. Hal ini dikarenakan, pada era teknologi informasi ini semua bisa dilakukan termasuk menyampaikan informasi yang tidak benar atau hoaks. Antisipasi perlu dilakukan agar tidak terjadi kegaduhan ditengah masyarakat.

Informasi yang diberikan melalui Dinas ini tentunya merupakan konsumsi publik atau masyarakat. Sehingga dalam penyampaiannya perlu diperhatikan apakah informasi yang diberikan sudah sesuai dengan standar jurnalistik. Selain itu, kualitas informasi juga menjadi faktor penting dalam menentukan apakah informasi tersebut layak untuk dipublikasikan kepada masyarakat atau tidak. Jika terdapat kekurangan dari kualitas informasinya maka apa strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas informasi kedepannya. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, strategi dan arah kebijakan yang dilakukan Dinas Kominfo yaitu melaksanakan pencapaian indikator yang ada pada indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3.2. Hasil Analisis Asoca

- A. Strategi AbO atau strategi ability – Opportunities** adalah strategi yang menggunakan kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Adapun strategi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :
- a. Dengan merekrut programmer yang berkompeten ataupun pegawai tambahan dapat mewujudkan implementasi egovernment melalui strategi komunikasi untuk mengefektifkan SPBE
 - b. Memanfaatkan kemampuan aparatur dalam memaksimalkan pelayanan secara online.
- B. Strategi SO atau strategi Strength – Opportunities** adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Adapun strategi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :
- a. Menggunakan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman dalam mencari peluang meningkatkan hasil evaluasi SPBE.

- C. Strategi AgO atau Strategi Agility – Opportunities** adalah strategi yang menggunakan kecerdasan untuk memanfaatkan peluang yang tersedia. Adapun yang dapat digunakan adalah sebagai berikut : a. Memanfaatkan inovasi dari aparatur yang berkompeten dalam strategi komunikasi kepada masyarakat b. Memanfaatkan inovasi dari pimpinan untuk mendapatkan dukungan dari pemda untuk pemberian Tambahan anggaran untuk memaksimalkan SPBE/e-government
- D. Strategi AbC atau strategi Ability – Culture** adalah strategi yang melihat kemampuan untuk menghadapi tuntutan lingkungan perubahan budaya. Adapun strategi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut : a. Memanfaatkan tingkat pendidikan aparatur yang tinggi untuk merubah budaya kerja yang kurang baik b. Memanfaatkan kebiasaan tertib dan tanggung jawab aparatur untuk meningkatkan kemampuan melayani aparatur Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasaman
- E. Strategi SC atau strategi Strength – Culture** adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi dan tanggap terhadap pengaruh budaya. Adapun strategi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut : a. Memanfaatkan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mengakses strategi komunikasi dalam implementasi e-government Dan penambahan anggaran alokasi pembaruan infrastruktur
- F. Strategi AgC atau Strategi ability – Culture** adalah strategi yang menggunakan kecerdasan untuk mensiasati pengaruh perubahan budaya. Adapun strategi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut : a. Memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan motivasi dari pimpinan dalam merubah budaya kerja yang tidak kondusif menjadi lebih baik b. Memanfaatkan kecerdasan pimpinan untuk mengarahkan dalam kemampuan masing-masing dari aparaturnya

Faktor penghambat maupun pendukung, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman perlu memberikan perhatian yang cukup untuk menjalankan tugas bahkan inovasi yang di laksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman agar implementasi dari e-government dapat dimaksimalkan supaya ada peningkatan dari sebelumnya agar pada evaluasi system pemerintahan berbasis elektronik selanjutnya bisa menjadi lebih baik dan membanggakan. Selain itu , anggaran untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman juga perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari aparatur dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan strategi komunikasi sebagai perwujudan layanan e-government kepada masyarakat, penulis menyimpulkan perekrutan sumber daya aparatur yang berkompeten khususnya di bidang programmer perlu ditindaklanjuti karena hal ini juga berpengaruh terhadap perkembangan maupun pembaharuan dari program ataupun aplikasi yang dijalankan dalam menunjang penerapan e-government di Kabupaten Pasaman. Selain itu, menyadarkan para aparatur untuk lebih berinovasi lagi dalam bekerja juga perlu ditindaklanjuti agar perkembangan e-government di Kabupaten Pasaman tidak terlalu jauh tertinggal dari kabupaten kota 97 lainnya. Penambahan alokasi anggaran bagi Dinas Komunikasi dan Informatika bisa menjadi peluang dalam memaksimalkan penerapan system pemerintahan berbasis elektronik dan memaksimalkan strategi komunikasi yang dilakukan aparatur terhadap pemberian informasi kepada masyarakat.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan adanya relevansi dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Destya Ayu Laela Rhomadhona (2020), berjudul “Pelaksanaan E-Government Dalam Pelayanan Perizinan Oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Aplikasi Gadget Mobile Application For License/Gampil)”. Dimana pada penemuan penting penulis bahwa dalam menjalankan suatu program di dalam sebuah organisasi pasti terdapat tujuan yang ingin dicapai. Program yang sudah ditetapkan sebelumnya akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar dalam pelaksanaannya bisa memperoleh hasil yang maksimal. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan suatu instansi yang bertugas dalam bidang informasi. Setiap program yang ditetapkan pasti akan dijalankan nantinya termasuk penyampaian informasi kepada publik.

Selain itu hasil penulis setuju dengan penelitian oleh Riska Aulia mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (AULIA et al.) dengan judul penelitian tentang “Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Via Aplikasi Tangerang Live Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Masyarakat Di Kota Tangerang”. Dimana secara garis besar perekrutan sumber daya aparatur yang berkompeten khususnya di bidang programmer perlu

ditindaklanjuti karena hal ini juga berpengaruh terhadap perkembangan maupun pembaharuan dari program ataupun aplikasi yang dijalankan dalam menunjang penerapan e-government.

Temuan utama yang menunjukkan kebaruan hasil penelitian penulis dibandingkan penelitian terdahulu lainnya selain informan dan lokus ialah penulis mendapati bahwa Memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan motivasi dari pimpinan dalam merubah budaya kerja yang tidak kondusif menjadi lebih baik merupakan strategi jitu yang berbeda bahkan temuan penulis dapat menjawab penelitian yang dilakukan oleh Dinda Nursah Yasti (2019), berjudul “Kualitas Pelayanan Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor yang menjadi faktor penghambat kurangnya minat masyarakat dalam mengambil informasi dari akun media informasi yang telah disediakan oleh Diskominfo Kabupaten Pasaman yaitu informasi yang disajikan atau informasi yang diberikan tidak disusun dengan menarik atau monoton sehingga masyarakat juga tidak tertarik untuk membaca atau bahkan melihat informasi yang diberikan, selain itu banyaknya hoaks yang beredar juga menjadi faktor penghambat kenapa masyarakat tidak tertarik dengan informasi dari akun Diskominfo karena merasa tidak percaya dengan informasi yang diberikan, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung lainnya yang dibutuhkan

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Komunikasi dalam Penerapan *E-government* oleh Diskominfo Kabupaten Pasaman masih belum efektif apalagi efisien. Masih banyak yang perlu diperbaiki baik dari sector infrastruktur , sumber daya manusia maupun strategi komunikasi dalam implementasi *egovernment* di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam program ini karena pada umumnya semua Kembali kepada anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Sehingga membuat para aparatur maupun karyawan terbiasa akan bekerja jikalau ada anggarannya sehingga membuat setiap pelayanan menjadi lambat dan tidak efektif. Dari segi konteks strategi komunikasi dalam

penerapan *e-government* , penulis menyimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika sudah memulai penerapan *e-government* melalui beberapa macam strategi seperti penyuluhan secara langsung maupun melalui media social. Program *e-government* atau system pemerintah berbasis elektronik sudah dimulai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman sejak diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman.

2. Faktor penghambat maupun pendukung, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman perlu memberikan perhatian yang cukup untuk menjalankan tugas bahkan inovasi yang di laksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman agar implementasi dari *e-government* dapat dimaksimalkan supaya ada peningkatan dari sebelumnya agar pada evaluasi system pemerintahan berbasis elektronik selanjutnya bisa menjadi lebih baik dan membanggakan. Selain itu , anggaran untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman juga perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari aparatur dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan strategi komunikasi sebagai perwujudan layanan *e-government* kepada masyarakat, penulis menyimpulkan perekrutan sumber daya aparatur yang berkompeten khususnya di bidang programmer perlu ditindaklanjuti karena hal ini juga berpengaruh terhadap perkembangan maupun pembaharuan dari program ataupun aplikasi yang dijalankan dalam menunjang penerapan *e-government* di Kabupaten Pasaman. Selain itu, menyadarkan para aparatur untuk lebih berinovasi lagi dalam bekerja juga perlu ditindaklanjuti agar perkembangan *e-government* di Kabupaten Pasaman tidak terlalu jauh tertinggal dari kabupaten kota lainnya. Penambahan alokasi anggaran bagi Dinas Komunikasi dan Informatika bisa menjadi peluang dalam memaksimalkan penerapan system pemerintahan berbasis elektronik dan memaksimalkan strategi komunikasi yang dilakukan aparatur terhadap pemberian informasi kepada masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Dinas saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat dari Asoca

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang serupa berkaitan dengan strategi komunikasi dalam penerapan E-Government untuk menemukan hasil yang lebih mendalam oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada DISKOMINFO Kabupaten Pasaman serta seluruh dosen pengajar, pembimbing penguji dan semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alhamid, Thalha. Budur Anufia. Instrumen Pengumpulan Data. 2019, pp. 148–62.
- Aulia, Riska, Et Al. Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Via Aplikasi Tangerang Live Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Masyarakat Di Kota Tangerang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019.
- Cangara, Hafied. (2014). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada 117
- Dinda, Nursah Yasti. Kualitas Pelayanan Melalui Penerapan Elektronik Government Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.
- Indrajit, Richardus Eko. (2011). Peranan Teknologi Informasi dan Internet. Yogyakarta: Andi Offest.
- Ruliana, Poppy. Lestari, Puji. Teori Komunikasi. PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Suradinata, Ermaya. “Analisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan
- Suradinata, Ermaya. “Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah.” Bandung: Ramadan, 1998.
“Organisasi Dan Manajemen Pemerintahan.” Bandung: Ramadhan, 1996.
- Tahir, Arifin. (2014). Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Tanjung, Adrinal dan Subagjo, Bambang. (2012). Panduan Praktis Menyusun Standard Operating Procedures (SOP). Yogyakarta: Total Media.